

Analisis *Balance of Power* dan *Economic Interest* Tiongkok dalam Pembangunan Pangkalan Militer Pertamanya di Djibouti 2016

Puguh Toko Arisanto

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

Adeline Astrid Maturbongs

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

Alamat: Universitas Teknologi Yogyakarta

Korespondensi penulis: ptas002@gmail.com

Abstract. *In 2016, China built its first overseas military base in Djibouti, East Africa. The base was established to prevent the rise of Somali pirates and piracy in the Gulf of Aden and the waters of Somalia. However, China was not the only country that had built military bases in the region. Previously, the United States, France, Italy, and Japan had also established military bases in the area. This article will explain China's motives for building a military base in Djibouti in relation to other countries, aside from preventing piracy. In this article, the authors use the concepts of balance of power and national interests to analyze it. The authors use qualitative research methods and secondary data collection techniques from relevant books, journal articles, and websites. The research results show that China's military base establishment is an effort to soft balance against the United States' power in Djibouti. In addition, China also has economic motives, which is to facilitate and secure China's international trade, considering the location of the Chinese base is close to the Doraleh port, gateway to trade with Africa and Europe.*

Keywords: *China, Djibouti, Military Base, Softbalancing, Economic Interests.*

Abstrak. Tahun 2016, Tiongkok membangun pangkalan militer pertamanya di luar negeri. Pangkalan militer tersebut dibangun di negara Djibouti, Afrika Timur. Pangkalan tersebut digunakan untuk mencegah kenaikan pembajakan perompak Somalia di Teluk Aden dan Perairan Somalia. Namun, Tiongkok bukanlah satu-satunya negara yang membangun pangkalan militer di wilayah tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat (AS), Perancis, Italia dan Jepang telah membangun pangkalan militer di wilayah tersebut. Artikel ini akan menjelaskan mengenai motif Tiongkok membangun pangkalan militer di Djibouti dalam relasinya dengan negara-negara lainnya selain untuk mencegah perompakan bajak laut. Dalam artikel ini, penulis menggunakan konsep *balance of power* dan kepentingan nasional menganalisisnya dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder yang sumbernya berasal dari buku, artikel jurnal dan *websites*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pangkalan militer Tiongkok adalah sebagai upaya Tiongkok untuk melakukan softbalancing terhadap kekuatan AS di Djibouti. Selain itu, Tiongkok juga memiliki motif ekonomi yakni untuk mempermudah dan mengamankan perdagangan internasional Tiongkok, mengingat lokasi pangkalan Tiongkok berdekatan dengan pelabuhan Doraleh yang merupakan gerbang perdagangan ke Afrika dan ke Eropa.

Kata kunci: Tiongkok, Djibouti, Pangkalan Militer, *Softbalancing*, Kepentingan Ekonomi.

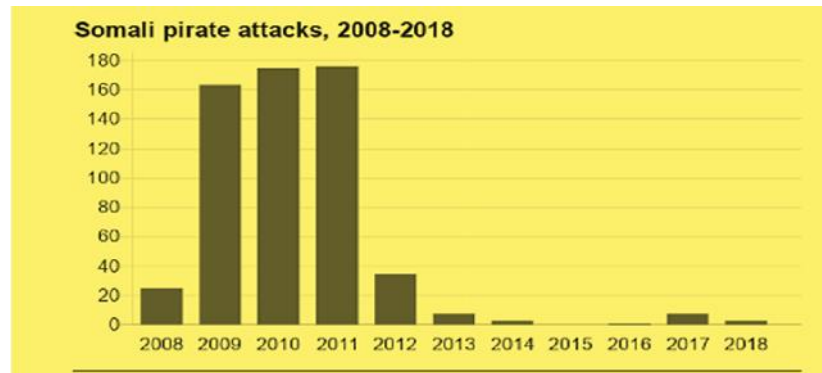
LATAR BELAKANG

Tiongkok merupakan negara yang beberapa tahun belakangan ini menjadi pembicaraan yang hangat di lingkungan global dikarenakan ekonominya yang meningkat bahkan disebut sebagai sebuah negara *superpower* yang bisa disejajarkan dengan negara *superpower* lainnya seperti Amerika Serikat (AS). Sebuah gagasan *Thucydides Trap* memprediksi bahwa Tiongkok akan mengambil alih estafet kepemimpinan dunia dari AS (Wibawa & Arisanto, 2019). Ini terbukti, salah satunya di bidang energi terbarukan, Tiongkok menjadi pemimpin dunia dalam investasi energi terbarukan tahun 2003-2011 (Chotimah, 2017). Dilansir dari data *The World Bank* tahun 2021, Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok berada di tingkat teratas di Asia menyingkirkan Jepang dimana PDB Tiongkok senilai 17734.06 triliun USD. PDB ini juga tertinggi kedua setelah AS di Dunia. Pencapaian ekonomi tersebut tercapai diiringi dengan kebijakan luar negeri Tiongkok di bidang ekonomi disebut dengan program *Belt and Road Initiative* (BRI). BRI merupakan program kebijakan dan investasi jangka panjang lintas benua yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan percepatan integrasi ekonomi negara-negara di sepanjang jalur-jalur sutra yang bersejarah. BRI diresmikan pada tahun 2013 oleh presiden Tiongkok Xi Jinping (Arisanto & Nasrum, 2022). BRI bertujuan untuk mempromosikan konektivitas benua Asia, Eropa, Afrika, dan laut yang berdekatan.

Tiongkok juga memiliki sektor kekuatan militer yang sama kuatnya dengan sektor ekonomi. Kekuatan militer Tiongkok sejalan dengan kemajuan perekonomian Tiongkok. Perekonomian yang meningkat pesat menjadikan Tiongkok menjadi salah satu negara dengan kapabilitas militer terbesar di dunia (Arisanto & Wibawa, 2021). Pada tahun 2022, Tiongkok berada di posisi tiga negara dengan militer terkuat di dunia dengan skor *PwrIdx*: 0.051 dan urutan pertama di dunia dengan jumlah terbanyak keaktifan personel militernya. Tiongkok diperkirakan memiliki total personil militer sebanyak 3.134.000 dengan personil aktif sebanyak 2.000.000. Di darat Tiongkok memiliki 5.250 tank, 35.000 kendaraan lapis baja, 1.734-unit artileri, unit artileri swagerak, dan 3.160unit proyektor roket. Di udara, Tiongkok memiliki 1.200unit pesawat tempur dan 281unit helikopter tempur. Di air, Tiongkok memiliki 2 kapal induk, 79unit kapal selam dan 41 kapal perusak (Arfiansyah, 2022).

Besarnya kekuatan militer Tiongkok tidak hanya digunakan untuk latihan dan kepentingan keamanan dalam negeri saja. Kekuatan militer ini juga dilakukan untuk misi-misi keamanan yang Tiongkok lakukan di luar negeri. Salah satu misi keamanan yang Tiongkok operasikan di luar negeri ialah *Tionggok's Anti-Piracy Operations in Somali* dimana operasi keamanan ini dilakukan sejak tahun 2010. *Tionggok's Anti-Piracy Operations* sendiri ialah operasi anti pembajakan yang dilakukan oleh pasukan khusus Tiongkok yang dikirim untuk menjaga dan mengawal Teluk Aden dan Perairan Somalia dari perompak Somalia. Operasi ini tidak hanya dilakukan oleh Tiongkok saja tetapi ada beberapa negara lain seperti AS, Uni Eropa, Korea Selatan, Malaysia, India, Yaman, dan sebagainya baik secara mandiri maupun secara kolektif atau operasi gabungan.

Grafik 1. Serangan Perompak Somalia 2008-2018.



Sumber: European Naval Force dalam BBC, 2019.

Operasi anti pembajakan yang dilakukan beberapa negara melalui operasi gabungan dan independen akhirnya membuahkan hasil. Ini bisa dilihat pada grafik di atas bahwa ditahun 2012 aktivitas pembajakan dan perampokan yang dilakukan perompak Somalia turun drastis dan ditahun-tahun berikutnya aktivitas pembajakan dan perampokan yang dilakukan perompak Somalia terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan tersebut terus berkurang (BBC, 2019). Operasi anti pembajakan ini terus berjalan untuk menghindari dan menekan aktivitas pembajakan perompak Somalia di wilayah Teluk Aden dan Perairan Somalia yang dinilai merugikan negara-negara yang melintasi kawasan dengan tingkat ancamannya yang sangat beresiko (Bridger, 2011).

Guna mencegah kenaikan pembajakan perompak somalia, akhirnya membuat beberapa negara seperti Prancis, AS, Italia dan Jepang memutuskan untuk membangun pangkalan militer di negara Afrika yang dekat dengan lokasi operasi anti pembajakan tersebut. Akhirnya terpilihlah Djibouti sebagai negara tempat pembangunan pangkalan

militer asing milik negara lain (Surya, 2020). Djibouti terletak di kawasan jalur hubungan internasional dimana aktivitas ekspor-impor masuk dan keluar dari Djibouti dan negara-negara Afrika yang tidak berbatasan langsung dengan laut serta menjadi tempat persinggahan lalu lintas hubungan internasional. Seolah tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya, Tiongkok memutuskan untuk membangun pangkalan militernya di Djibouti pada tahun 2016 dan mulai beroperasi pada Agustus 2017. Ini sekaligus menjadi pangkalan militer pertama Tiongkok di luar negeri. Pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti tentunya menarik perhatian internasional dan kehadiran kekuatan asing (seperti AS dan Tiongkok) berpotensi mempengaruhi situasi keamanan regional Djibouti (Melvin, 2019). Pembangunan pangkalan militer ini menjadi berita yang hangat dikarenakan pangkalan ini merupakan pangkalan militer pertama Tiongkok di luar negeri dan mendapatkan respon yang cukup kontra karena pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti ini dinilai sebagai visi dan misi Tiongkok untuk menanamkan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut dan mewujudkan ambisi globalnya. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti kepentingan Tiongkok dalam pembangunan pangkalan militer di Djibouti. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan konsep *balance of power* dan *national interest* (kepentingan nasional).

KAJIAN TEORITIS

Balance of Power (BOP) merupakan salah satu konsep yang populer dalam teori atau perspektif realisme. Di tengah anarkinya sistem internasional yang ditandai dengan tidak adanya pemerintah dunia yang memiliki otoritas melebihi negara dan tidak adanya *international police* yang dapat menegakkan aturan-aturan internasional, negara-negara perlu menjamin atau keamanan negara-negaranya secara mandiri atau *self-help*. Dalam hal ini, tatanan internasional yang bersifat anarki menandai *absent*-nya otoritas kekuatan di atas negara yang mengelola maupun mengatur keberlangsungan hubungan internasional sehingga ini dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik bahkan perang antar negara. Hal ini kemudian berdampak pada perilaku negara, dimana setiap negara akan berusaha memaksimalkan kekuatan dan kapabilitas pertahanan mereka masing-masing. Dalam hal ini, para penstudi realisme menyarankan untuk melakukan sebuah upaya penyeimbangan kekuatan dalam struktur internasional yang dikenal sebagai konsep *balance of power* (BOP) (Lebow, 2007)

Lebih lanjut BOP dapat dipahami sebagai strategi atau tindakan kebijakan nasional suatu negara untuk menyeimbangkan kekuasaan atau kekuatan negara lainnya (Sheehan, 1996). Untuk menyeimbangkan ini negara membutuhkan *power*. *Power* dapat berbentuk hal, seperti: teritori, penduduk, sumber daya alam, ekonomi, politik, militer, dan kondisi negara (Iswardhana & Arisanto, 2022). Tujuan dari upaya penyeimbangan kekuatan tersebut adalah untuk mencegah meningkatnya dominasi dari aktor hegemoni tunggal, dan jika terjadi perimbangan kekuatan maka yang diharapkan adalah distribusi kekuatan dan penguatan keamanan dalam bentuk aliansi internasional.

Berdasarkan kondisi tertentu, setidaknya ada 3 jenis manifestasi BOP dalam hubungan internasional yakni:

1. *Hard Balancing* adalah penyeimbangan kekuatan oleh negara-negara yang sedang terlibat konflik atau persaingan antar negara. Cara yang dilakukan untuk menyeimbangkan kekuatan negara ialah membuat aliansi militer dan politik untuk meningkatkan kapasitas militer serta hubungan diplomatik yang bertujuan untuk mendukung kepentingan keamanan sebuah negara untuk melawan pesaing.
2. *Soft Balancing* adalah penyeimbangan kekuatan yang bersifat non militer tetapi sebuah negara mempunyai tujuan untuk membatasi tindakan lawan pada sebuah wilayah. Kemudian melemahkan kekuatan lawan dengan memberikan fasilitas keamanan dan ekonomi kepada sekutu lawan. Terakhir sebuah negara akan membentuk aliansi baru atau memilih negara sekutu lawan untuk menghilangkan pengaruh lawan pada suatu wilayah.
3. *Asymmetry Balancing* adalah penyeimbangan kekuatan yang dilakukan untuk menyeimbangkan keamanan yang datang dari aktor subnasional. Aktor subnasional seperti teroris, kelompok bersenjata, dan sebagainya. Aktor subnasional ini sifatnya menentang negara dan aktor subnasional melakukan usaha untuk menyeimbangkan kekuatan dominasi negara (Paul, 2004).

Selain BOP, penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional. Secara singkat, *national interest* atau kepentingan nasional adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh suatu negara. Kepentingan nasional adalah aspek paling penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional bukan hanya teori atau konsep abstrak karena sangat berperan penting dalam proses nyata kebijakan luar negeri. Hal ini juga bisa menjadi basis untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan luar

negeri tertentu. Menurut Donald E. Nuechterlein (1976), setidaknya ada 4 kategori kepentingan nasional yang menjadi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara yakni:

1. Kepentingan pertahanan: setiap negara berusaha melindungi keamanan teritorial dan penduduknya terhadap ancaman dari luar yang bersifat fisik. Oleh sebab itu, kekuatan militer sangat diperlukan guna melindunginya.
2. Kepentingan ekonomi: menstimulasi dan meningkatkan perekonomian sebuah negara dengan hubungannya terhadap negara-negara lain.
3. Kepentingan tatanan dunia: pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional agar sebuah negara bisa merasa aman serta rakyat dan alur perdagangannya berjalan dengan baik dan aman di luar sebuah negara.
4. Kepentingan ideologis: perlindungan dan kelanjutan dari seperangkat nilai yang dimiliki dan dipercayai oleh orang-orang dari negara-bangsa secara universal (Nuechterlein, 1976).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Dengan kata lain, ini secara sederhana dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian (Sugiyono, 2005). Jenis penelitian ini biasanya menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mengacu pada pertanyaan penelitian dan analisis yang hendak diterapkan pada topik yang hendak diteliti. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang identik dengan studi pustaka dari sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal dan *websites* terkait. Data yang diperoleh kemudian direduksi dan dianalisis guna menjawab rumusan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan diplomatik Tiongkok-Djibouti Hingga tahun 2015

Hubungan antara Tiongkok dan Djibouti telah ada sejak awal abad ke-20, ketika Tiongkok memulai hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika. Setelah Djibouti memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1977, Tiongkok dengan cepat mengambil langkah untuk mengembangkan hubungan diplomatik antara pemerintah

Tiongkok dan Djibouti. Hubungan diplomatik tersebut dimulai pada 8 Januari 1979 yang dilakukan oleh duta besar masing-masing negara (Dube, 2016). Hubungan diplomatik ini sesuai dengan prinsip saling menghormati kedaulatan nasional dan integritas teritorial, non-agresi terhadap negara lain, tidak ikut campur tangan dalam urusan internal negara lain, kesetaraan dan saling menguntungkan serta koeksistensi damai. Pemerintah Tiongkok mendukung tujuan yang adil dari pemerintah Djibouti untuk menjaga kemerdekaan nasional, kedaulatan negara, dan integritas teritorial negara Djibouti. Pada awal 2000-an, Tiongkok mulai menginvestasikan sejumlah besar uang di Djibouti, terutama di sektor infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya. Djibouti menjadi salah satu negara Afrika yang paling banyak menerima investasi Tiongkok.

Berdasarkan data *globalsecurity.org* dan *china.org*, berbagai kerja sama dan pencapaian telah yang dilakukan setelah hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Djibouti mulai terjalin, yaitu:

- Sejak 1979, Tiongkok telah memberi Djibouti proyek bantuan termasuk Istana Rakyat, monumen, stadion, gedung rawat jalan, proyek perumahan, dan gedung kantor kementerian luar negeri.
- Tahun 1980, setelah pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Djibouti berhasil, hubungan diplomatik ini dimulai dengan pengiriman tim medis Tiongkok ke Djibouti.
- Tahun 1982, kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama-kerjasama ekonomi dan teknis.
- Tahun 1986, Tiongkok dan Djibouti juga telah melakukan kerjasama di bidang budaya dan pendidikan serta kesehatan dimana Tiongkok mulai memberikan beasiswa bagi mahasiswa di Djibouti dimana banyak mahasiswa yang mulai belajar di Tiongkok.
- Tahun 1991, Tiongkok telah memberi Djibouti proyek bantuan dan termasuk pusat konferensi “People’s Palace” senilai 10 juta USD dan stadion olahraga senilai 11 juta USD.
- Tahun 1997, Tiongkok juga memberikan hibah untuk sayap baru rumah sakit umum utama di Djibouti dan gedung baru Kementerian Luar Negeri.
- Tahun 1998, Tiongkok dan Djibouti telah menandatangani perjanjian perdagangan antara Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Djibouti.

- Tahun 2001, investasi proyek perumahan oleh Tiongkok ke Djibouti. Di tahun ini juga Presiden Guelleh yang merupakan presiden Djibouti dengan sekelompok pejabat pemerintah dan pebisnis melakukan kunjungan yang secara signifikan meningkatkan hubungan bisnis Tiongkok dan Djibouti.
- Tahun 2002, telah ada 478 kontrak untuk kerjasama layanan yang ditandatangani antara kedua negara tersebut. Pada tahun ini juga volume perdagangan mencapai 49,83 juta USD, diantaranya ekspor Tiongkok sebesar 49,81 juta USD dan impor sebesar 20.000 USD.

Perusahaan Tiongkok yang mengerjakan proyek di Djibouti adalah *China Construction Engineering Co.*, *China Civil Engineering Corp*, dan beberapa perusahaan Tiongkok lainnya. Kunjungan Presiden Guelleh yang merupakan presiden Djibouti pada tahun 2001 ke China dengan sekelompok pejabat pemerintah dan pebisnis secara signifikan meningkatkan hubungan bisnis Tiongkok dan Djibouti. Djibouti juga telah banyak berinvestasi dalam teknologi komunikasi Tiongkok, bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok ZTE dan Huawei pada jaringan telepon tetap dan seluler serta teknologi Internet. Perusahaan konstruksi Tiongkok juga aktif dalam peningkatan pembangunan Djibouti (Global Security, n.d).

Pada tahun 2008 pengaruh Tiongkok di Djibouti memang belum sekuat pengaruh Prancis atau AS, tetapi pengaruh itu terlihat, terus menerus, dan berkembang. Pengaruh Tiongkok umumnya di dua proyek yakni sektor swasta dan publik. Di tingkat pemerintah-pemerintah, setiap tahun pada bulan Juli/Agustus, pemerintah Tiongkok mengundang pejabat dari berbagai departemen Pemerintah Djibouti untuk tur selama 15 hari di Tiongkok. Perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh pemerintah China. Anggota Kementerian Pertahanan, Parlemen, Kepresidenan, dan Kementerian Luar Negeri telah mengunjungi Tiongkok dalam perjalanan ini (Global Security, n.d).

Pada 22 November 2015, proyek kereta api Ethiopia-Djibouti yang dikerjakan oleh dua perusahaan Tiongkok berhasil mengangkut angkutan barang sementara untuk pasokan darurat. Kargo pertama, membawa 1125 ton gandum dari Djibouti tiba di Merebe Mermersa sekitar 112 km di selatan ibukota Ethiopia Addis Ababa. Pemerintah Ethiopia telah membeli gandum dalam jumlah besar untuk mendukung orang-orang di daerah yang terkena dampak kekeringan. Rel kereta api Ethiopia-Djibouti sepanjang 756 km juga dibangun oleh *China Railway Group* (CREC) dari Sebeta atau Addis Ababa ke Miesso

dan *China Civil Engineering Construction Corporation* (CCECC) bertanggung jawab atas seksi Miesso ke Djibouti (Xinhua, 2015)

Eratnya hubungan Tiongkok dan Djibouti, tidak terlepas juga dari program kebijakan luar negeri Tiongkok yaitu BRI tahun 2013. BRI sendiri melintasi jalur sutra yang telah dibuat oleh Tiongkok dimana jalur sutra tersebut merupakan daerah-daerah yang pernah dijajah dimasa lampau kemudian diberikan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan investasi ekonomi. Djibouti merupakan negara yang masuk ke dalam jalur sutra tersebut. BRI memberikan bantuan infrastruktur dan ekonomi yang besar kepada Djibouti. Oleh sebab itu ekonomi Djibouti sangat bergantung pada Tiongkok. Terbukti dengan hutang negara di Djibouti yang sangat besar kepada Tiongkok dibanding dengan negara lain, hutang Djibouti ke Tiongkok mencapai 80% (Neicho, 2016).

Pembangunan Pangkalan Militer Sebagai *Softbalancing* Tiongkok terhadap Kekuatan AS di Kawasan Afrika

Pada era globalisasi ini, negara-negara saling berkompetisi untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di kawasan strategis. Salah satu cara untuk mempertahankan kekuatan nasional adalah dengan membangun pangkalan militer di wilayah strategis tersebut. Seperti halnya Tiongkok, yang berupaya membangun pangkalan militer di Kawasan Afrika pertama kalinya di luar negeri yakni Djibouti. Kehadiran Tiongkok dalam pembangunan pangkalan militer di Djibouti tahun 2016 mendapat respon yang negatif dari negara-negara yang lebih dahulu membangun pangkalan militer di Djibouti khususnya AS (Rochawati, 2019). Ditambah hubungan erat Tiongkok dengan Djibouti yang sudah terjalin sejak kemerdekaan Djibouti. Tiongkok telah memberikan bantuan dalam banyak hal seperti investasi dan pembangunan infrastruktur. Melihat pengaruh besar Tiongkok di Djibouti menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang lebih dahulu membangun pangkalan militernya di Djibouti. Hal ini dikarenakan kapasitas pangkalan militer Tiongkok adalah yang terbesar diantara negara-negara lainnya. Berikut adalah perbandingan kapasitas pangkalan militer Tiongkok dengan negara lain:

Tabel 1. Kapasitas Militer Negara Negara di Djibou

NO	NEGARA	KAPASITAS MILITER
1	Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menampung 10.000 tentara • Luas 200 Hektar • Kontrak pertahun 20 juta USD • Fasilitas: pos angkatan laut yang dilengkapi dengan fitur toko senjata, sarana pemeliharaan kapal, dan helikopter, serta gedung untuk menampung tentara marinir atau pasukan khusus Tiongkok
2	Amerika	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menampung 4.000 tentara • Luas 97 Hektar • fasilitas dermaga untuk kapal perang serta lapangan udara untuk pesawat patroli maritim dan pesawat tempur
3	Jepang	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung 180 tentara • Luas 12 Hektar • Dermaga untuk satu kapal perang serta hangar yang mampu menampung beberapa pesawat patroli maritim • Telah menempatkan menempatkan satu kapal perang serta dua pesawat patroli maritim P-3C Orion di pangkalan militer mereka di Djibouti
4	Perancis	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menampung 3000 tentara • Fasilitas: 2 resimen, 1 pesawat kargo militer, 10 pesawat tempur, 1 pesawat patroli maritim serta 10 helikopter militer
5	Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung 300 tentara • Pesawat nirawak

Sumber: (Melvin, 2019).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pangkalan militer Tiongkok di Djibouti memiliki kapasitas yang besar jika dibandingkan negara lain. Berdasarkan kapasitas pangkalan militer yang dimiliki, Tiongkok berhasil mendahului atau menyeimbangkan kekuatan militernya dengan negara-negara lain bahkan bisa dikatakan terbesar diantara negara-negara lainnya. Melihat *softbalancing* adalah penyeimbangan kekuatan yang bersifat non militer tetapi sebuah negara mempunyai tujuan untuk membatasi tindakan lawan pada sebuah wilayah, penulis beragumen bahwa upaya pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti sebagai upaya *softbalancing* terhadap kekuatan AS yang telah lama mendominasi kawasan tersebut. Adapun bentuk *softbalancing* yang dilakukan oleh Tiongkok dapat dilihat melalui pengaruh yang diberikan Tiongkok terhadap respon AS. Respon negatif tersebut ditunjukkan AS dalam

menanggapi kehadiran Tiongkok (Rochawati, 2019). Para pejabat senior militer AS merasa khawatir terhadap Tiongkok. Hal ini disebabkan Tiongkok berencana meningkatkan kehadirannya di kawasan itu melalui pengerahan kapal selam dan mengembangkan kemitraan keamanannya. Pembentukan fasilitas militer permanen di Djibouti dianggap sebagai usaha persaingan kemampuan dan penyebaran pengaruh di masa yang akan datang (Panda, 2017). Selain itu hal ini dianggap sebagai langkah strategis Tiongkok untuk mempromosikan peningkatan bertahap kekuatan laut Tiongkok di Samudra Hindia yang disebut *String of Pearls* (Suri, 2016). Pernyataan akan kekhawatiran ini didukung pernyataan Anggota Kongres AS yang telah menyuarakan keprihatinan tentang peran Tiongkok yang berkembang di Djibouti. Selain itu kepada Kongres, Jenderal Waldhauser juga berpendapat tentang prospek pengawasan Tiongkok di Djibouti dan menyarankan agar AS berhati-hati atas strategi Tiongkok dalam usaha penyebaran pengaruh, peluang, kehadirannya di wilayah Djibouti yang mungkin berpotensi menjadi sebuah konsekuensi signifikan jika Tiongkok menguasai pelabuhan (Ali & Stewart, 2018).

Kekawatiran terhadap kekuatan Tiongkok di Afrika khususnya di Djibouti, memaksa AS menjadikan fakta tersebut sebagai perhatian utama. Pemerintahan Donald Trump telah menempatkan prioritas tinggi untuk melawan pengaruh Tiongkok di Afrika secara lebih luas. Penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengklaim bahwa Tiongkok menargetkan investasi mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas AS dan "praktik predator" di benua tersebut, mengutip pembuatan kesepakatan yang korup dan buram, pinjaman eksploitatif dan aktivitas industri ekstraktif yang mementingkan diri sendiri (Garamone, 2018). Disisi lain strategi keamanan nasional 2017, menggambarkan pengaruh Tiongkok yang dianggap sebagai perusak pembangunan Afrika melalui merusak para elit, mendominasi industri ekstraktif, dan mengunci negara-negara ke dalam hutang dan komitmen yang tidak berkelanjutan dan buram.

Dilihat dari sisi Djibouti, hutang yang besar Djibouti kepada Tiongkok menimbulkan kekhawatiran para pejabat AS. Mereka khawatir jika adanya hutang ini dapat menggeser kekuatan dan pengaruh AS di Djibouti dan di Afrika (Harris, 2018). Hal ini didukung oleh pernyataan dari Pejabat Djibouti yang menyatakan jika Djibouti berterima kasih kepada Tiongkok atas pembangunan infrastruktur dan menyerukan kepada negara asing seperti Tiongkok untuk membantu Djibouti tanpa memikirkan potensi jebakan hutang. Hal ini menunjukkan jika Djibouti telah meletakkan kepercayaannya kepada Tiongkok yang secara tak

langsung menunjukkan keberhasilan pengaruh Tiongkok terhadap Djibouti. Adanya pergeseran pengaruh AS beralih kepada Tiongkok di Djibouti menunjukkan keberhasilan pengaruh dan implementasi ide pemikitan konsep *softbalancing* yang menjelaskan penyeimbangan kekuatan melalui pengaruh dan strategi selain dengan adu kekuatan militer.

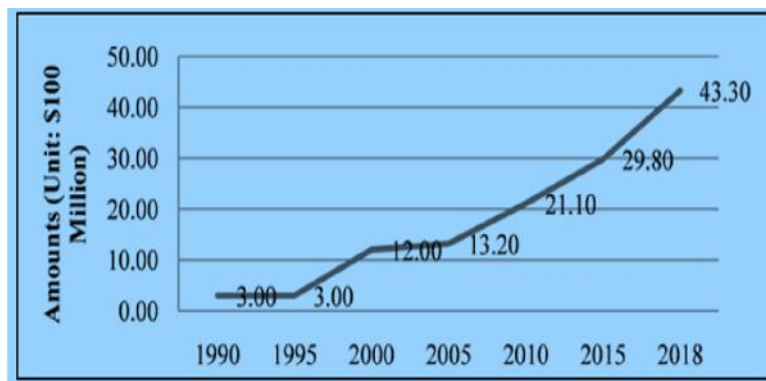
Kontribusi Ekonomi Tiongkok di Afrika dan Kepentingan Ekonomi Tiongkok dalam Pembangunan Pangkalan Militer di Djibouti

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memegang pengaruh ekonomi yang besar di kawasan Afrika. Hal ini ditunjukkan dari tahun 1990 hingga 2000. Afrika memperoleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta lingkungan investasi kawasan tersebut juga meningkat. Tiongkok melakukan reformasi di kawasan Afrika melalui bantuan asing, dan perusahaan dari Tiongkok secara bertahap menjadi investor utama kerjasama Tiongkok dan Afrika. Hubungan Tiongkok negara-negara Afrika berkembang melalui berbagai pertukaran ekonomi dan kerjasama, termasuk bantuan ekonomi, investasi pemerintah, kerjasama ekonomi dan perdagangan, dan kerjasama yang saling menguntungkan lainnya (Rosinawati & Munabari, 2021). Pemerintah Tiongkok mengedepankan strategi global yang menguntungkan dengan mengadvokasi pemerintah lain dan perusahaan domestik untuk mengeksplorasi pasar internasional. Komisi pembangunan dan reformasi nasional, kemudian komisi perencanaan negara, menyusun rencana investasi formal untuk negara-negara Afrika, yang merupakan pertama kalinya Tiongkok menetapkan target spesifik dan rencana yang layak untuk bidang, skala, dan tujuan investasi Afrika.

Langkah orientasi baru ke Afrika menandai awal dari transformasi strategis Tiongkok di Afrika menuju situasi baru abad ke-21, yaitu transformasi bertahap dari investasi dan perdagangan impor dan ekspor dengan \$16,5 miliar menjadi investasi pengembangan sumber daya. Dari tahun 2013 hingga 2020, FDI di Afrika mengalami penurunan, terutama investasi dari negara-negara maju Eropa dan AS menurun karena kemitraan baru yang dibentuk dan diputuskan oleh negara-negara Afrika untuk lebih bekerja sama dengan Tiongkok. Selama *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) pada tahun 2000 dan 2018 di Tiongkok dan pada tahun 2015 di Afrika Selatan Presiden Tiongkok XI Jinping memberikan \$60 miliar selama tiga tahun untuk menangani pinjaman dan asisten untuk benua Afrika (CNN Indonesia, 2018). Kebijakan Tiongkok di bawah inisiatif XI Jinping BRI adalah untuk mendukung pabrik-

pabrik Afrika yang memproduksi barang-barang untuk ekspor dan membangun Jalan, proyek kereta api pelabuhan di Afrika, dan seluruh dunia. Inisiatif BRI Tiongkok adalah proyek pembangunan ekonomi yang besar dan rumit untuk meningkatkan kerja sama dan perdagangan dengan 78 negara yang melintasi Asia. Tiongkok merupakan sumber investasi terbesar di Afrika. Meskipun arus investasi Tiongkok ke Afrika turun 29,80% pada tahun 2016, Afrika tetap menjadi tujuan terbesar untuk investasi luar negeri Tiongkok (Debongo & Wu, 2020).

Grafik 2. Aliran Investasi Tiongkok hingga 2018.



Sumber: (Debongo & Wu, 2020)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa skala investasi Tiongkok di Afrika relatif kecil pada tahap awal. Namun, dengan serangkaian inisiatif dan langkah-langkah seperti komunitas Afrika dengan inisiatif masa depan bersama, BRI, *the China-Africa economic* dan perdagangan Tiongkok dan Afrika, pertumbuhan ekonomi Afrika, dan lingkungan investasi terus ditingkatkan. Tiongkok melakukan reformasi melalui bantuan luar negeri dan kerjasama Tiongkok Afrika terjalin pada awal tahun 1960. Sejak saat itu, Tiongkok telah membentuk dana pembangunan Tiongkok dan Afrika serta kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Namun, tidak boleh diabaikan bahwa meskipun pertumbuhannya pesat, investasi Tiongkok di Afrika masih memiliki banyak tahapan untuk tumbuh dalam hal tata letak keseluruhan dan volume investasi Tiongkok di dunia. Karena itu, Seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 1.5, arus investasi Tiongkok di Afrika dari tahun 1990 hingga 1995 belum signifikan, hanya dengan arus investasi 3% di Afrika. Hubungan Tiongkok-Afrika, pada tahun 2000, arus investasi Tiongkok meningkat secara signifikan dan signifikan dengan 12% mencapai 43,30% pada tahun 2018. Artinya, Tiongkok dan Afrika memiliki kepercayaan nyata

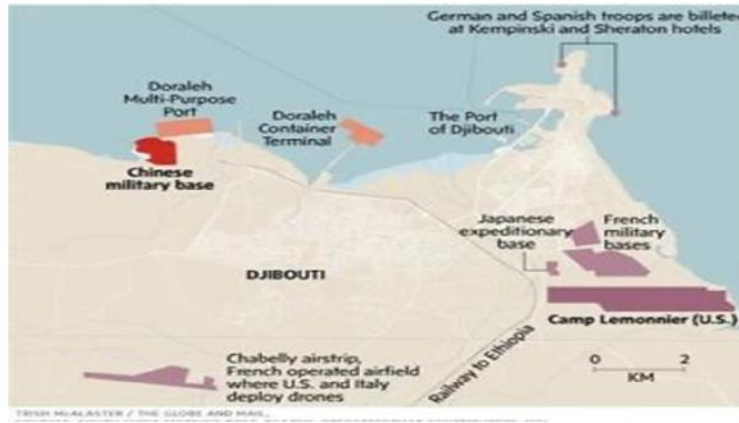
terhadap kerja sama bilateral, dan kerja sama itu terus berlanjut hingga sekarang. Pada tahun 2015, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Afrika, Tiongkok berjanji akan mengucurkan dana investasi 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 802 triliun untuk pembangunan Afrika.

Dalam konteks kontribusi ekonomi Tiongkok di Djibouti, Tiongkok dilaporkan telah menyediakan hampir \$1,5 miliar dalam 4 September 2019 pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur besar di Djibouti sejak tahun 2000. Di antara proyek-proyek yang sedang dibangun oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam zona perdagangan bebas senilai \$3,5 miliar, yang diperkirakan akan menjadi yang terbesar di Afrika. Tahap pertama selesai pada 2018, dan diharapkan dapat menciptakan 200.000 pekerjaan baru dan menangani lebih dari \$7 miliar dalam perdagangan dari 2018 hingga 2020.

Tiga perusahaan Tiongkok memiliki saham di FTZ, bersama otoritas pelabuhan Djibouti. Proyek investasi lain yang didukung Tiongkok termasuk pengembangan fasilitas pelabuhan dan infrastruktur terkait, termasuk kereta api dan dua bandara (kontrak \$420 juta) dan pipa untuk memasok Djibouti dengan air dari negara tetangga Ethiopia (kontrak \$320 juta). Ethiopia, negara yang terkurung daratan berpenduduk lebih dari 100 juta orang, bergantung pada Djibouti untuk transit 90% dari perdagangan formalnya, yang baru-baru ini difasilitasi oleh jalur kereta api baru antara kedua negara. Jalur tersebut dibangun dan dioperasikan oleh dua perusahaan Tiongkok dan sebagian dibiayai oleh Bank Ekspor dan Impor Tiongkok.

Berkaitan dengan *locational advantages*, Tiongkok memilih lokasi pembangunan pangkalan yang dekat dengan pelabuhan Doraleh karena letak wilayahnya yang strategis terutama dalam hal pelayaran untuk perdagangan. Kesepakatan kerjasama militer antara kedua negara tersebut merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak saling mendukung dan memfasilitasi atas pembangunan pangkalan militer tersebut. Pemerintah Tiongkok diketahui harus membayar 20 juta USD sebagai bentuk pajak kepada pemerintah Djibouti (Darmawan & Ningsih, 2020). Selain itu, biaya untuk pembangunan pangkalan mencapai hamper 600 juta USD.

Gambar 1. Lokasi Pangkalan Militer Tiongkok di Djibouti.



Sumber: Lansinginstitute, 2021.

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa lokasi pangkalan militer Tiongkok berdekatan dengan pelabuhan Doraleh yang termasuk dalam pelabuhan internasional dan bagian penting dalam aktivitas pelayaran, 40 % produk impor Tiongkok melewati jalur perairan ini menuju ke Tiongkok. Pelabuhan Doraleh merupakan aset berharga bagi Tiongkok karena kontribusi Tiongkok dalam pengembangan pelabuhan tersebut. Disebutkan bahwa pelabuhan Doraleh dinaungi oleh *Port de Djibouti Société Anonyme* (PDSA), sebuah perusahaan patungan yang dibentuk pada tahun 2013 oleh dua pihak yaitu *China Merchants* dan *the Djibouti Ports and Free Zones Authority* (DPFZA) (Darmawan & Ningsih, 2020).

Pada dimensi kepentingan ekonomi bahwa kepentingan ekonomi digunakan untuk menstimulasi dan meningkatkan perekonomian sebuah negara dengan hubungannya terhadap negara-negara lain. Tiongkok berencana menggunakan pelabuhan lain di beberapa titik sebagai tempat pengisian bahan bakar dan fasilitas lainnya untuk melancarkan aktivitas dagangnya. Dikutip dari *China Daily*, dari presiden *China Merchants Group* yang mengatakan bahwa Tiongkok sangat memanfaatkan keuntungan geografis Djibouti di pelabuhan Doraleh, yang rencananya dijadikan sebagai Shekou dari Afrika Timur, yaitu tempat penyaluran logistik dan perdagangan secara regional. Hal ini membuktikan secara jelas bahwa sektor ekonomi merupakan salah satu alasan utama Tiongkok membangun pangkalan militer pertamanya.

Dalam konteks BRI dan pangkalan militer, Tiongkok telah mempertimbangkan Djibouti sebagai bagian penting dari proyek ambisius tersebut. Dalam skema BRI sendiri Djibouti diproyeksikan menjadi lokasi yang sangat strategis bagi Tiongkok karena menjadi pintu gerbang ke kawasan Afrika serta penghubung Afrika dengan kawasan Eropa. Dalam hal pelayaran, pelabuhan Doraleh *connector* antar titik pelabuhan yang melintasi dua benua. Pembangunan pangkalan Djibouti yang berada di dekat pelabuhan Doraleh, semakin mempermudah Tiongkok dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Pangkalan militer Tiongkok dapat menjadi *backing* yang kuat dalam hal pengamanan perdagangan guna kelancaran tujuan pelayaran dan perdagangan internasional Tiongkok strategis yang menghubungkan Terusan Suez, Teluk Aden, dan Samudera Hindia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti merupakan pangkalan pertama Tiongkok di luar negeri. Tiongkok telah memiliki hubungan yang baik dengan Djibouti sebelum terbentuknya pangkalan militer tersebut. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti merupakan bentuk implementasi *softbalancing* Tiongkok terhadap kekuatan dan pengaruh AS di wilayah Djibouti. Tiongkok ingin mengimbangi pengaruh AS sekaligus membatasi tindakan AS di wilayah tersebut. AS merespon secara negatif bahwa tindakan Tiongkok merupakan ancaman bagi pengaruh AS, merusak pembangunan Djibouti, mengeruk sumber daya Djibouti dan sebagainya. Kontribusi di sektor pembangunan, ekonomi dan bisnis Tiongkok di Afrika dan Djibouti menjadikan Tiongkok mudah membangun pangkalan militernya di dekat pelabuhan Doraleh. Lokasi pelabuhan Doraleh yang strategis dan dapat menghubungkan Afrika dan Eropa memudahkan Tiongkok guna memenuhi kepentingan ekonominya khususnya untuk pelayaran dan perdagangan barang-barang untuk ke Tiongkok maupun dari Tiongkok. Pangkalan militer yang berada dekat dengan pelabuhan Doraleh dapat menjadi *backing* atau bagian penting bagi pemenuhan kepentingan ekonomi Tiongkok yang berkaitan dengan perdagangan di jalur sutra atas dasar proyek BRI.

REFERENSI

- Ali, I., & Stewart, P. (2018, 3 7). *'Significant' consequences if China takes key port in Djibouti: U.S. general*. Retrieved from reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-djibouti-idUSKCN1GI2V0>
- Arfiansyah, T. R. (2022, 05 10). *10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2022, AS Nomor 1*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/150000365/10-negara-dengan-militer-terkuat-di-dunia-2022-as-nomor-1?page=all>
- Arisanto, P. T., & Nasrum, A. D. (2022). Analisis Investasi Tiongkok Di Eastern Economic Corridor Thailand Dalam Skema Belt And Road Initiative. *Syntax Idea*, 602-613.
- Arisanto, P. T., & Wibawa, A. (2021). Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif Convulsive Amerika Serikat. *Indonesian Journal of International Relations*, 163-183.
- BBC. (2019, 09 21). *Iranian hostage freed by Somali pirates after four years*. Retrieved from BBC.com: <https://www.bbc.com/news/world-africa-49782075>
- Bridger, J. (2011, 02 05). *Somali Piracy And The World's Response*. Retrieved from Natoassociation: <https://natoassociation.ca/somali-piracy-and-the-worlds-response/>
- Chotimah, H. C. (2017). Analisis Strategi Keamanan Energi Cina dalam Upaya Penurunan. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 29-43.
- CNN Indonesia. (2018, 9 4). *China Akan Gelontorkan US\$60 Miliar untuk Afrika*. Retrieved from Cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180904093313-532-327389/china-akan-gelontorkan-us-60-miliar-untuk-afrika>
- Darmawan, A., & Ningsih, I. W. (2020). Kepentingan Cina dalam Pembangunan Pangkalan Militer di Djibouti pada Tahun 2016. *Indonesian Journal of International Relations*, 142-163.
- Debongo, D. Y., & Wu, H. Q. (2020). Re-Evaluation on China's Investment in Africa: From the Perspective of African Citizens. *iBusiness*, 174-180.
- Dube, F. (2016, 10 5). *China's Experiment in Djibouti*. Retrieved from TheDiplomat: <https://thediplomat.com/2016/10/chinas-experiment-in-djibouti/>
- Garamone, J. (2018, 12 13). *National Security Advisor Unveils Administration's Africa Strategy*. Retrieved from defense.gov: <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1713212/national-security-advisor-unveils-administrations-africa-strategy/>
- Global Security. (n.d, - -). *Djibouti - China Relations*. Retrieved from Globalsecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/djibouti/forrel-prc.htm>
- Harris, G. T. (2018, 8 30). *China Is Loaning Billions of Dollars to African Countries. Here's Why the U.S. Should Be Worried*. Retrieved from time.com: <https://time.com/5381467/china-africa-debt-us-security/>
- Iswardhana, M., & Arisanto, P. (2022). Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna. *Madani: Jurnal Sosial dan Politik Kemasyarakatan*, 210-245.
- Lansing Institute. (2021, 4 2). *Al-Shabaab Threats to American and French Forces Can Benefit China And President Guelleh Campaign*. Retrieved from lansinginstitute.org: <https://lansinginstitute.org/2021/04/02/al-shabaab-threats-to-american-and-french-forces-can-benefit-china-and-president-guelleh-campaign/>

- Lebow, R. (2007). *Classical Realism*, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) *International Relations Theories*. Oxford University Press.
- Melvin, N. (2019). *The Foreign Military Presence in the Horn of Africa region*. Solna: Stockholm International Peace Research Institute.
- Neicho, J. (2016, 4 8). *Opening up democracy in Djibouti: great powers and little battalions*. Retrieved from Opendemocracy.net: <https://www.opendemocracy.net/en/opening-up-democracy-in-djibouti-great-powers-and-little-battalions/>
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making. *British Journal International Studies*, 248.
- Panda, R. (2017, 9). *Djibouti Military Base Is a New Step in China's Maritime Footprint*. Retrieved from Globalasia.com: https://www.globalasia.org/v12no3/feature/djibouti-military-base-is-a-new-step-in-chinas-maritime-footprint_rajaram-panda
- Paul, T. (2004). *Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance*. California: Stanford University Press.
- Rochawati, H. (2019). *Respons Amerika Serikat Terhadap Pembangunan Pangkalan Militer Cina di Djibouti (2014-2018)*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.
- Rosinawati, N. U., & Munabari, F. (2021). Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok di Afrika pada Periode Xi Jinping (2013-2019). *Intermestic: Journal of International Studies*, 252-276.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suri, G. (2016). *China's 21 Century Maritime Silk Road*. Vivekananda International Foundation.
- Surya, M. (2020). *Analisi Kepentingan Pemerintah Djibouti Dalam Menerima Kedatangan Pangkalan Militer Asing Tiongkok*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Retrieved from *Analisi Kepentingan Pemerintah Djibouti Dalam Menerima Kedatangan Pangkalan Militer Asing Tiongkok*.
- Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2019). Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao. *Nation State: Journal of International Studies*, 105-122.
- Xinhua. (2015, 11 23). *Chinese-built Ethio-Djibouti railway accomplishes temporary freight transportation*. Retrieved from China.org: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2015-11/23/content_37130733.htm